



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat atas asset Negara, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - b. bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat DPRD.
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disebut Kantor Kesbang Linmas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat APBD.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik kepada partai politik diberikan bantuan keuangan.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap tahun anggaran.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik Tingkat Provinsi.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun anggaran.

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

BAB III
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Sebelum dana Bantuan Keuangan disalurkan terlebih dahulu dilakukan penelitian dan verifikasi terhadap keberadaan Partai Politik serta Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan bantuan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan bantuan keuangan di tingkat Daerah disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang sah kepada Walikota.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
- a. surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain yang sah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat atau sebutan lain yang sah;
 - b. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - c. foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

- e. kuitansi bermateri secukupnya yang ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua;
 - f. foto copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Partai yang masih berlaku;
 - g. lampiran tersebut pada huruf a, b, c, d, e dan f dibuat sebanyak rangkap 2 (dua).
- (4) Surat Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD, Kantor Kesbang Linmas atau sebutan lainnya yang sah.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada partai politik dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah terima.

Pasal 9

Dalam hal Partai Politik yang sedang menghadapi permasalahan intern dan atau adanya pengurus kembar, bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Walikota setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Oktober 2006

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG**

ttd

R. IZHARUDDIN, SE
Pembina Tk I
NIP. 420 007 625

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2006 NOMOR 2
SERI E NOMOR 1**

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG**

HERMAN SUPRIJANTO
Pembina
NIP. 19680124 199401 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Pemerintah Kota Tanjungpinang menjamin warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan Daerah, sesuai sistem demokrasi perwakilan dengan pelaksanaanya melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagai asset Negara dan Daerah, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di Daerah pada Khususnya, Pemerintah Kota Tanjungpinang memandang perlu memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum tahun 2004, dengan kepengurusan di Tingkat Kota Tanjungpinang.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan mewujudkan cita-cita Bangsa dan Indonesia serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik juncteis Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah kota Tanjungpinang tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di tingkat Kota tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi yang didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan Sekretariat Partai Politik tingkat Kota tidak sama dengan kegiatan Partai Politik tingkat Provinsi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2.

**ACARA SERAH TERIMA PERANGKAT ICT DARI FAIR NORWEGIA KEPADA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
SABTU, 22 JULI 2006**

1. Ass. Wr. Wb, Selamt Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua
Acara Serah Terima Perangkat ICT dari FAIR Norwegia Kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, dimulai.
2. Acara pada Pagi hari ini diawali dengan Penyerahan secara Simbolis Perangkat ICT dari FAIR Norwegia kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang akan diserahkan oleh Presiden Fair Norwegia kepada Walikota Tanjungpinang. Kepada MR. KNUT FOSEIDE dan IBU Hj.SURYATATI A. MANAN dipersilakan.
3. Hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan Sambutan Presiden FAIR, MR. KNUT FOSIEDE. Dipersilakan.
4. Terimakasih kepada MR. KNUT FOSIEDE.
Berikut kita ikuti Sambutan Kuasa Usaha Duta Besar Norwegia untuk Indonesia,
5. Hadirin yang kami muliakan
Acara dilanjutkan dengan Sambutan Walikota Tanjungpinang, Ibu Hj. Suryatati A. Manan, dipersilakan.
6. Demikian Sambutan Walikota Tanjungpinang, selanjutnya kita ikuti Sambutan Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ismeth Abdullah. Kepada Bpk dipersilakan.
7. Pembacaan Doa, dipimpin oleh Sdr SLAMET
8. Dengan berakhirnya doa tadi maka selesai pula acara serah terima pagi hari ini, kami selaku penyelenggara acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kekurangan pd pelaksanaan acara ini.
Akhir kata Wabillahi Taufiq Walhidayah Ass. Wr. Wb.
9. Mohon perhatian setelah ini akan diadakan Jumpa Pers dengan Walikota Tanjungpinang dan Presiden Fair.